



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2012 – 2013
TANGGAL 23 – 27 APRIL 2013**

I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI yang mempunyai ruang lingkup kerja tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan dan kependudukan secara rutin mengunjungi berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bersama dengan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI yang adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) maka dalam reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012 - 2013, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja salah satunya ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komisi IX DPR RI berharap dapat mengelaborasi permasalahan dan mendapatkan masukan secara langsung untuk menghasilkan solusi yang membangun bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun rombongan Komisi IX DPR RI yang ikut dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

No.	No. Angg	N a m a	Jabatan	Fraksi	Daerah Pemilihan
1.	342	dr. Ribka Tjiptaning	Ketua Tim	PDI-P	Jabar
2.	442	dr. Dian A. Syakhroza	Anggota	PD	Bengkulu
3.	444	H. Heriyanto, SE, MM	Anggota	PD	Lampung
4.	481	Dhiana Anwar, SH	Anggota	PD	Jabar
5.	490	Siti Mufattahah, Psi	Anggota	PD	Jabar
6.	268	Hj. Ryani Soedirman, S.Sos	Anggota	PG	Sulsel
7.	325	Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, PhD	Anggota	PDI-P	Sumsel
8.	327	Ir. Rudianto Tjen	Anggota	PDI-P	Babel
9.	382	Dra. Sri Rahayu	Anggota	PDI-P	Jatim
10.	397	dr. Karolin Margret Natasa	Anggota	PDI-P	Kalbar
11.	48	H. Ansory Siregar, Lc	Anggota	PKS	Sumut
12.	79	Drs. M. Martri Agoeng	Anggota	PKS	Jateng
13.	130	Dra. Mardiana Indraswati	Anggota	PAN	Jatim
14.	285	Muhammad Iqbal, SE, M.Com	Anggota	PPP	Sumbar
15.	42	Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si	Anggota	P. Gerindra	NTT

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A.1.1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas, dan instansi terkait (Kesehatan, Nakertrans, Badan POM, BKKBN, BP3TKI Provinsi Bangka Belitung, Askes dan Jamsostek).

Dalam pertemuan tersebut, berdasarkan pemaparan, penjelasan serta tanya jawab antara Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya, disampaikan hal-hal penting terkait Kesehatan dan Ketenagakerjaan yaitu:

BIDANG KESEHATAN

Anggaran Kesehatan

Masalah kesehatan merupakan hal yang membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk dukungan anggaran baik dari APBN maupun APBD. Anggaran Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 mengalami penurunan drastis dibanding tahun 2011 yang mencapai 17,18% dari total APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2012, anggaran Dinkes hanya mencapai 2,52% atau sekitar Rp.40.777.278.456,- dari total APBD sebesar Rp.1.619.791.080.526,-. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (2) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji.

Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mendukung pembangunan program kesehatan. Program ini mendapat alokasi dana APBD, APBN dan PHLN. Hal ini terlihat dari makin meningkatnya dana sektor kesehatan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 yaitu mencapai Rp.218.088.275.643,72,- dengan realisasi sebesar 93,44%. Sementara untuk dana APBN, dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima dana dekonsentrasi, namun tidak menerima dana Tugas Pembantuan. Alokasi anggaran untuk dana dekonsentrasi tersebut sebesar Rp.13.703.946.000,- dengan realisasi mencapai Rp.9.760.093.700,- atau 71,22%.

Jaminan Kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di RSUD dengan sasaran masyarakat miskin melalui dana APBN yang dikenal dengan program Jamkesmas, dan melalui dana APBD dengan sasaran seluruh masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan yang dikenal dengan program Jaminan Kesehatan Serumpun Sebalai (JKSS). Hal ini didasarkan amanat UUD tahun 1945 Pasal 28 H, serta UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dari jumlah penduduk provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 sebanyak 1.261.737 jiwa, sekitar 1.072.242 jiwa sudah tercakup dalam program jaminan kesehatan atau 84,98%. Sedangkan sebanyak 189.495 atau 15,02% belum masuk dalam program jaminan kesehatan.

Adapun rincian penduduk di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota provinsi Kep. Bangka Belitung yang tercakup program jaminan kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Jaminan Kesehatan	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1.	Askes Sosial	87.384	6.93%
2.	Jamkesmas	212.826	16.87%
3.	PJKMU/Jamkesda	729.589	57.82%
4.	TNI / Polri	14.342	1.14%
5.	Jamsostek	26.393	2.09%
6.	Asuransi Swasta	1.708	0.14%
	TOTAL	1.072.242	84.98%

Sumber data: diolah dari bkpm.go.id

Jamkesmas

Jumlah kuota Jamkesmas untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 berjumlah 116.726 sementara jumlah penduduk miskin sebanyak 105.305 jiwa. Hal ini berarti, bahwa seluruh penduduk miskin telah dicakup dalam program Jamkesmas.

Tenaga Kesehatan

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kegiatan guna meningkatkan kualitas tenaga kesehatan antara lain melalui integrasi kesehatan jiwa yang

dilakukan sejak tahun 2006 – 2010, pelatihan kesehatan jiwa untuk tenaga kesehatan. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan khususnya di puskesmas dalam menangani pasien-pasien gangguan jiwa dan dapat mendeteksi dini pasien dengan gangguan jiwa.

Selain itu juga dilakukan pelatihan kesehatan jiwa untuk kader kesehatan jiwa dan penjangkaran pasien gangguan jiwa. Kegiatan ini bertujuan untuk merekrut dan melatih kader kesehatan jiwa di setiap desa dalam menangani pasien gangguan jiwa ringan dan mendata pasien gangguan jiwa berat diseluruh desa oleh tenaga kesehatan di puskesmas bekerjasama dengan kader kesehatan jiwa.

Kesehatan Jiwa

Jumlah kunjungan rawat jalan pasien gangguan jiwa pada tahun 2012 sebanyak 578 kasus yang terdiri dari 525 pasien gangguan jiwa ringan dan 53 pasien gangguan jiwa berat dan yang paling banyak ditangani adalah gangguan psikotik sebanyak 317 kasus.

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi penderita gangguan jiwa berupa jaminan kesehatan rakyat yaitu untuk menjamin pengobatan pasien gangguan jiwa baik pengobatan di puskesmas maupun di RSJ termasuk didalamnya pembiayaan, obat dan ambulance.

Yang masih menjadi kendala dalam menangani masalah kesehatan jiwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah masih kurangnya tenaga kesehatan jiwa, baik perawat kesehatan jiwa maupun dokter spesialis kesehatan jiwa (psikiater).

MDG's

Dalam target pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) tahun 2015, terlihat pencapaian beberapa indikator yang makin membaik di Provinsi kepulauan Bangka Belitung di tahun 2012 yang lalu, antara lain menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari target 15 menjadi 9,66 per 1.000 kelahiran hidup, menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun sebelumnya yaitu dari 149,83 menjadi 138 per 100.000 kelahiran hidup, dan meningkatnya rasio tenaga kesehatan yaitu untuk rasio dokter umum dari 25,37 menjadi 28,3, dokter spesialis dari 5,26 menjadi 5,56, dan rasio perawat dari 206,85 menjadi 220,03 per 100.000 penduduk.

Desa Siaga

Desa siaga merupakan salah satu pendukung guna mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat sehingga dapat mempercepat penurunan jumlah AKI, AKB dan AKABA sesuai target MDG's tahun 2015. Desa siaga berada dibawah bimbingan seorang bidan dan 2 (dua) orang kader, maka desa siaga diharapkan dapat menjadikan desa yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga di Indonesia baru dicanangkan tahun 2007 melalui dana APBN/dekon. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, sampai tahun 2011 jumlah desa siaga mencapai 296 dan 171 desa siaga aktif dari 360 desa/kelurahan.

PT. ASKES (PERSERO)

Peran PT Askes (Persero) menghadapi BPJS tahun 2014

Dalam menghadapi pelaksanaan BPJS sesuai UU No.24 Tahun 2012, dimana PT. Askes (Persero) menjadi *leading sector* dalam pelayanan kesehatan harus mempersiapkan banyak hal antara lain kepesertaan Jaminan Kesehatan, dan ketersediaan jumlah SDM, fasilitas pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, tempat tidur dan kebutuhan lain sehingga pelaksanaan BPJS dapat berjalan baik.

Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Dari jumlah penduduk provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 sebanyak 1.261.737 jiwa, sekitar 1.072.242 jiwa sudah tercakup dalam program jaminan kesehatan atau 84,98%. Sedangkan sebanyak 189.495 atau 15,02% belum masuk dalam program jaminan kesehatan. Dan dari 1.072.242 jiwa, yang tercakup dalam program jaminan kesehatan yang dikelola PT. Askes (Persero) sebanyak 420.210 jiwa.

Ketersediaan tempat tidur

Untuk tingkat provinsi Kep. Bangka Belitung secara umum jumlah tempat tidur belum memenuhi standard WHO yaitu 1 : 1.000 penduduk yaitu 1.393 tempat tidur untuk 1.261.737 penduduk yang tersebar di 15 Rumah Sakit. Untuk tingkat kabupaten, ada beberapa kabupaten yang masih kekurangan fasilitas tempat tidur, yaitu kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Belitung Timur. Sementara untuk jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat I, ada 56 buah puskesmas, 22 buah klinik kesehatan dan 190 dokter praktek total 268 unit.

SDM

Berdasarkan analisa beban kerja dalam menyusun proyeksi kebutuhan SDM dalam rangka persiapan BPJS tahun 2014, secara nasional PT.Askes (Persero) membutuhkan lebih dari 5.000 pegawai baru untuk menambahkan dari jumlah pegawai yang ada saat ini yang berjumlah 2.972 pegawai sehingga nantinya mencapai 7.500 pegawai. Tahun 2013, PT.Askes (Persero) Pangkalpinang mendapatkan alokasi SDM 5 orang pegawai baru dan 10 pegawai peningkatan status.

Beberapa langkah nyata yang diambil PT. Askes (Persero) untuk menghadapi transformasi dan peleburan menjadi BPJS Kesehatan tahun 2014 yaitu melakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan verifikator (INA-CBG's), diklat transformasi kultural, pemetaan jumlah kebutuhan faskes BPJS, memfasilitasi faskes untuk mempersiapkan standar pelayanan medis pada masing-masing tingkatan pelayanan, melakukan pemetaan Badan Usaha dan jumlah pekerja, mempersiapkan faskes dengan melakukan *credentialing* terhadap faskes Jamsostek, TNI/Polri yang bersedia bekerjasama serta sosialisasi BPJS kepada 31 pihak terkait.

BKKBN

Dukungan BKKBN terhadap pelaksanaan Program KB untuk menjaring sebanyak-banyaknya peserta KB adalah melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB seperti IUD KIT, implant KIT di 7 RSUD, 1 Rumkitban TNI, 232 klinik KB pemerintah (puskesmas dan pustu), 10 klinik KB swasta dan memberikan pelatihan kepada 83 bidan dan 9 dokter yang bersertifikat, serta laparoscopy untuk pelayanan MOW di RSUD Pangkal Pinang, Sungai Liat, Belitung, Belitung Timur dan RS Bhakti Timah.

Pencapaian peserta KB baru tahun 2012

Pencapaian sasaran peserta KB baru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu berkurang 3.764 peserta. Dari 7 kabupaten/kota yang ada, hanya Kabupaten Bangka Barat yang tidak bisa mencapai 100% kepesertaan baru.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Kondisi umum

Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 6.532 orang dibanding tahun 2011 yang mencapai 589.634 orang, dimana sebanyak 262.058 orang atau 44,94% penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan, yang berusaha mandiri sebanyak 136.707 (23,4%).

Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan per 2012 menunjukkan peningkatan dibanding sektor jasa kemasyarakatan. Melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), tertinggi ada di kabupaten belitung yaitu sebesar 66,63% dan yang terendah dimiliki kabupaten Bangka Tengah sebesar 61,09%

Anggaran

Alokasi anggaran APBN untuk sektor ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan di tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.8.440.466.000,- dengan penyerapan mencapai 91,85% sementara anggaran APBD sebesar Rp.15.045.129.752,- dengan penyerapan mencapai 82,67%.

Pembangunan ketenagakerjaan

Melihat besarnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 920.065 orang yang memiliki potensi ketenagakerjaan, langkah yang diambil pemerintah daerah adalah dengan memaksimalkan fungsi BLK yaitu dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi terhadap 720 orang pencari kerja di tahun 2012.

Untuk itu diperlukan dana baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Untuk pelaksanaan pelatihan di tahun 2012, sebanyak 40 paket pelatihan bersumber dari dana APBN, sementara dana APBD digunakan untuk membiayai 5 paket pelatihan. Alokasi pembiayaan paket pelatihan dari APBN lebih besar, sebab sejak tahun 2008 sampai sekarang dana APBD difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana BLK berupa pembangunan gedung, workshop dan peralatan pendukung lainnya.

Jaminan Sosial Pekerja

Dari total jumlah pekerja formal tahun 2013 yang mencapai 69.013, hanya 48.310 pekerja yang mendapatkan Jaminan Sosial dari 1.185 perusahaan. Sementara pekerja informal yang mencapai 271.135 pekerja, hanya 2.903 orang dan sebanyak 1.292 peserta merupakan peserta perseorangan.

Transmigrasi

Lokasi transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 2 (dua), yaitu UPT Bukit Anda Kabupaten Bangka Selatan, serta UPT Selinsing Kabupaten Belitung Timur. adapun transmigran di Kabupaten Bangka Selatan berasal dari Jawa Tengah, sedangkan di Kabupaten Belitung Timur, berasal dari provinsi Jawa Barat dan Jawa tengah. Program transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mengalami masalah. Alasan penduduk asli ikut berpartisipasi dalam program transmigrasi adalah untuk kemajuan suatu kawasan dan dapat mengadopsi teknologi pertanian serta adat budaya.

A.1.2. Peninjauan Lapangan

1. RS Soekarno

Dalam peninjauan lapangan ke RS Soekarno, didapati hal-hal sebagai berikut:

- a. RS Soekarno belum memiliki ruang rawat inap.
- b. Sejak diresmikan hingga saat ini, belum ada pasien melahirkan.

2. BLK Provinsi

Dalam peninjauan lapangan ke BLK Provinsi, didapatkan data:

- a. BLK provinsi merupakan proyek yang dibangun sejak tahun 2008 yang selesai dibangun tahun 2011, dan baru difungsikan tahun 2012 yang merupakan pindahan dari BLK Lama yaitu di Pedindang, Pangkalanbaru, Bangka Tengah. Kepindahan BLK ke tempat yang baru karena lokasi lahan BLK lama yang tidak memungkinkan.
- b. Kurangnya penjagaan dan gedung yang belum terpagar mengakibatkan BLK rawan pencurian.
- c. Jumlah BLK yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 1 (satu) buah dengan luas mencapai 10 ha. BLK melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik institusional maupun non-institusional (Mobile Training Unit) berupa Pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat.
- d. Fasilitas dan prasarana BLK meliputi gedung kantor (workshop listrik dan IT), workshop las, workshop otomotif, workshop bangunan (yang berada di BLK lama) dan gedung asrama.
- e. Jumlah instruktur BLK total 15 orang, dengan perincian : 4 orang instruktur kejuruan las, 4 orang instruktur kejuruan otomotif, 2 orang instruktur kejuruan IT, untuk kejuruan bangunan ada 2 orang dan kejuruan listrik 3 orang.
- f. Jumlah peserta pelatihan di BLK, 80 orang dilatih dengan menggunakan dana APBD tahun 2012, jumlah peserta meningkat di tahun 2013 menjadi 448 orang dengan 28 paket pelatihan. Sementara, peserta pelatihan yang di danai APBN tahun 2012 sebanyak 640 orang. Jumlah tersebut menurun di tahun 2013 yang hanya membatasi 256 orang yang akan di latih.
- g. Status gedung UPTD BLK adalah milik pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

A.1.3. Kesimpulan/temuan

Bidang Kesehatan

1. Terkait kesehatan, ada beberapa masalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu kurangnya kualitas SDM kesehatan, kuantitas dan penyebaran SDM yang belum memenuhi standar rasio per jumlah penduduk serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas yang belum sebanding dengan pelayanan di Rumah sakit.
2. Masih terdapat kekurangan fasilitas tempat tidur di beberapa kabupaten/kota, yaitu kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Belitung Timur.
3. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, fasilitas kesehatan tingkat I di provinsi Kep. Bangka Belitung hanya 268 unit dengan perincian 56 puskesmas, 22 klinik dan 190 dokter praktek. Jumlah tersebut jelas masih relatif kurang.
4. Untuk pelayanan kesehatan jiwa, pemerintah daerah masih kekurangan tenaga kesehatan jiwa, baik perawat kesehatan jiwa maupun dokter spesialis kesehatan jiwa (psikiater).

Bidang Ketenagakerjaan

1. Masih ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang dapat memberikan bantuan dana untuk calon wirausahawan, dan belum semua program CSR dapat menjawab kebutuhan wirausaha mandiri bagi masyarakat.
2. Terjadi penurunan angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Untuk kegiatan operasional transmigrasi, diperlukan beberapa perbaikan jalan pemukiman transmigrasi UPT Bukit Anda di Kabupaten Bangka Selatan, serta diperlukan kendaraan operasional.
4. Dana pelaksanaan pelatihan di BLK provinsi berasal dari dana APBD, APBN dan dana pihak ke III. Untuk ke depan, anggaran pelatihan akan dipusatkan pada anggaran APBD.
5. Terjadi penurunan jumlah peserta pelatihan yang di danai APBN tahun 2013 bila dibandingkan dengan jumlah peserta pelatihan tahun 2012.

A.2.1. Pertemuan dengan Bupati Bangka Barat, beserta SKPD terkait (Kesehatan, Nakertrans, Badan POM, BKKBN, BP3TKI Provinsi Bangka Belitung, Askes dan Jamsostek).

Kondisi umum

Dengan wilayah yang memiliki luas wilayah sekitar 2.820,61 km², jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat tahun 2012 mencapai 197.325 jiwa. Dari total penduduk tersebut, hanya 5.031 jiwa atau 2,55% yang tergolong penduduk miskin. Angka tersebut mehurun hampir 50% dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 4,69%.

BIDANG KESEHATAN

Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan Kabupaten Bangka Barat bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APBD Kabupaten Bangka Barat. Untuk tahun 2012, anggaran kesehatan Kabupaten Bangka Belitung berjumlah 49.982.316.098,- dan terealisasi sebesar 91,29%.

Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda/Jamkesra

Penduduk Kabupaten Bangka Barat seluruhnya sudah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan dari Pemerintah baik Jamkesmas maupun Jamkesra. Kuota jamkesmas Kabupaten Bangka Belitung meningkat dari tahun 2012 sebesar 14.074 menjadi 26.050 pada tahun 2013. Tahun 2012, anggaran yang diterima pemda kabupaten Bangka Barat sebesar Rp.934.489.000,-.

Program Jaminan Kesehatan Rakyat (Jamkesra) yang menjadi program pemerintah Kabupaten Bangka Barat menjamin pembiayaan kesehatan bagi seluruh masyarakat kabupaten Bangka Barat yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Untuk menjadi peserta Jamkesra, masyarakat cukup menunjukkan KTP/KK. Kepesertaan Jamkesra tahun 2012 sebanyak 164.000 jiwa dari total penduduk 189.526 jiwa.

Tenaga Kesehatan

Tahun 2011, jumlah tenaga kesehatan Kabupaten Bangka Barat belum sebanding dengan jumlah penduduk. Untuk itu perlu kreativitas Pemkab setempat agar jumlah tenaga dokter semakin banyak, minimal sesuai perbandingan antara jumlah dokter dengan penduduknya.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Kondisi Umum

Jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka Barat ada 213 perusahaan, dimana hanya 52 perusahaan yang telah melaksanakan wajib lapor, dengan Tenaga Kerja Asing sebanyak 395 orang di 9 lapangan usaha. Dari total jumlah perusahaan tersebut, hanya 83 perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya di Jamsostek dengan total pekerja 5.972 pekerja.

Anggaran

Alokasi APBD sektor ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat tahun 2012 sebesar Rp.806.400.000,- atau sekitar 10,54% dari total APBD Kabupaten Bangka Barat. Dari alokasi tersebut, realisasi mencapai 92,54%.

BLK

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 1 (satu) buah BLK yang berkoordinasi dengan Kemenakertrans RI, BLK Provinsi dan perusahaan di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Dengan sarana dan prasarana yang ada hingga saat ini hanya gedung kantor, 3 kelas ruang praktek dan teori, alat perbengkelan, pertukangan, menjahit, dan memasak. BLK di Kabupaten Bangka Barat selama ini hanya menggunakan instruktur dari BLK Provinsi. Adapun tenaga yang dilatih hanya 12 orang di bidang tata boga.

Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki lokasi transmigrasi yang akan dilaksanakan di Desa Jebus kecamatan Jebus dengan jumlah KK yang akan ditempatkan sebanyak 200 KK.

A.2.2. Peninjauan Lapangan ke RSUD Sejiran Setason

Dalam peninjauan lapangan ini, didapat beberapa data sebagai berikut:

- a. Lokasi RS sangat jauh dan terletak ditengah hutan. Masyarakat lebih memilih pergi ke RS Pangkal Pinang dibanding ke RS di Muntok ini.
- b. Karenanya, untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab mengharapkan adanya pembangunan RS Pratama di Kabupaten Bangka Barat.
- c. Tahun anggaran 2012, realisasi kegiatan yang bersumber pada anggaran APBN adalah pengadaan alat-alat kesehatan RS (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.2 milyar dan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8,8 milyar.
- d. Sementara usulan anggaran kesehatan tahun 2014 adalah pengadaan alat kesehatan yang bersumber dana TP dengan usulan anggaran sebesar Rp.20 milyar, pengadaan IPAL RS, sumber dana TP dengan anggaran Rp.1,5 milyar, pengadaan incinerator RS (TP) dengan anggaran Rp.1,5 milyar, dan pembangunan gedung rawat inap kelas III dengan sumber dana dari DAK sejumlah Rp.4,5 milyar.

A.2.3. Kesimpulan/temuan

Bidang Kesehatan

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki program pemberian Jaminan kesehatan yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Rakyat (Jamkesra) bagi masyarakat yang belum tercakup dalam Jamkesmas.
2. Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan menambah jumlah ruang kelas III dengan dana dari APBD.
3. Jumlah tenaga kesehatan belum sebanding dengan jumlah penduduk. Untuk itu pemerintah kabupaten diharapkan dapat memiliki kreativitas untuk memenuhi jumlah tenaga kesehatan tersebut.
4. Tahun 2014, Pemkab Bangka Barat akan mengupayakan pembangunan RS Pratama guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mensinkronkan program Jamkesra antar Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
5. Lokasi RS Sejiran Setason kurang dapat dijangkau oleh masyarakat, sebab berada di tengah hutan dan sangat jauh untuk dapat dijangkau masyarakat. Sebab itu, masyarakat lebih banyak pergi ke RS Pangkal Pinang bagi masyarakat yang berada di kecamatan sebelah timur.

Bidang Ketenagakerjaan

1. Minimnya kesadaran perusahaan untuk melakukan wajib lapor perusahaan kepada disnaker setempat untuk dilakukan pendataan.
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 1 (satu) buah BLK dengan minimnya sarana dan prasarana.
3. Tidak adanya tenaga pelatih/instruktur di BLK Kabupaten Bangka Barat. Selama ini, mereka hanya memakai instruktur dari BLK Provinsi.

A.3.1. Pertemuan dengan Bupati Bangka Tengah, beserta SKPD terkait (Kesehatan, Nakertrans, Badan POM, BKKBN, BP3TKI Provinsi Bangka Belitung, Askes dan Jamsostek).

Kondisi umum

Penduduk Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dominasi oleh kelompok industri dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 19.462 orang dengan 339 unit usaha. Industri kerajinan yang diusahakan penduduk adalah kerajinan tangan berupa industri gelang/cincin/tongkat dari akar-akaran, anyaman kopiah/peci, dan industri kerajinan makanan berupa kerupuk, terasi dan lain-lain.

BIDANG KESEHATAN

Jamkesmas, Jampersal dan BOK

Tahun 2012, alokasi anggaran Jamkesmas untuk Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp.126.406.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.360.500,- atau hanya 2,66%. Alokasi anggaran Jampersal Rp.1.055.817.000,- dengan realisasi 85,25%. Sementara dana BOK yang diterima pemerintah kabupaten bangka Tengah di tahun 2012 sebesar Rp.650.550.000,- dengan realisasi mencapai 95,7%.

Untuk kegiatan Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 belum ada luncturan dana dari pusat, tetapi untuk pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal sudah berjalan. Sedangkan untuk kegiatan BOK tahun 2013 sudah berjalan di seluruh puskesmas tetapi belum ada pencairan dana.

Jaminan Kesehatan

NO	Jmlh Pddk	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan				
		Jamkesmas	Askes	Jamsostek	Jamkesta	%
2012	171.011 Jiwa	7.786 Jiwa	6.184 Jiwa	4.369 Jiwa	160.000 Jiwa	100%
2013	176.582 Jiwa	37618 jiwa	6.365 Jiwa	3486 Jiwa	129.113 Jiwa	100 %

Untuk kepesertaan Masyarakat Miskin dilayani dalam program Jamkesmas, sedangkan untuk masyarakat Bangka Tengah yang belum mempunyai jaminan kesehatan akan di layani semuanya di program Jamkesta Tahun 2012 dan 2013.

Alokasi anggaran Jamkesta

TAHUN	JUMLAH JIWA	ANGGARAN
2011	14.046 jiwa	Rp. 1.685.520.000,-
2012	160.000 jiwa	Rp. 8.640.000.000,-
2013	129.113 jiwa	Rp 16.000.000.000,-

Pada dasarnya alokasi dana untuk program Jamkesta setiap tahunnya mengalami peningkatan diharapkan pelayanan ke masyarakat lebih maksimal

Sistem rujukan

Sistem rujukan di Kabupaten Bangka Tengah dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat Pertama (Puskesmas), sementara rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) dilakukan ke RS daerah dan RS Rujukan Luar Provinsi Bangka Belitung.

SDM Kesehatan

Di Kabupaten Bangka Tengah, hanya ada 2 (dua) orang dokter keluarga, 4 (empat) orang dokter spesialis, 42 orang dokter umum dan 7 orang dokter gigi.

Sarana Pelayanan Kesehatan

NO	FASILITAS KESEHATAN	TOTAL	KET
1.	Rsud Dengan jumlah bed	1 50	
2.	Puskesmas iso	1	
3.	Puskesmas poned	2	
4.	Rumah bersalin	1	
5	Klinik pengobatan	3	
5.	Klinik bersalin	3	
6.	Praktik dokter perorangan	36	
7.	Poskesdes	58	
8.	Pustu	18	
9.	Puskesmas perawatan	1	
10.	Puskesmas non perawatan	6	
11	Posyandu	123	

Ket : Jumlah Poskesdes yang memiliki alkes lengkap baru 30 Unit dan 28 Unit belum lengkap.

Kesehatan Jiwa

Dalam hal penanganan pasien dengan gangguan jiwa, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menjalin kerjasama dengan RSJ Sungai Liat dalam pemberian pelayanan langsung di seluruh puskesmas. Tahun 2012, jumlah kunjungan pasien gangguan jiwa di Kabupaten Bangka Tengah mencapai 785 orang.

ASI Eksklusif

Banyak penduduk Kabupaten Bangka Tengah yang belum melakukan pemberian ASI eksklusif sehingga kurang mengerti manfaat dari ASI. Oleh karena itu untuk menggalakan program pemberian ASI tersebut, Pemkab merasa perlu untuk meningkatkan jumlah tenaga konselor menyusui di puskesmas dan RS diseluruh Bangka Tengah.

Status RSUD Bangka Tengah

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai komitmen yang besar untuk menjadikan **RSUD Kabupaten Bangka Tengah** dari tipe D ke tipe C namun ada beberapa kendala, antara lain:

1. Fungsi RS sebagai rujukan puskesmas belum maksimal karena didapatkan banyak sekali kasus-kasus dengan diagnose yang seharusnya dapat ditangani oleh puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit, oleh karena itu perlu dukungan dari stakeholder terkait kebijakan tentang rujukan.

2. Belum memiliki ruang bedah (OK) permanen (CSSD), sementara ini masih menumpang di ruang ponok
3. Belum memiliki ruang icu/iccu/nicu/picu
4. Belum adanya ruangan tetap untuk Ruang isolasi dimana masih satu gedung dengan ruangan yang lain sehingga faktor infeksi nosokomial sangat besar
5. Belum memiliki ruang perawatan yang memadai untuk ruang perawatan, ruang kelas 1 hanya 5 ruang, kelas 2 hanya 7 ruang, kelas 3 sebanyak 52 ruang.
6. Belum memiliki ruang poliklinik yang memadai, sementara ini masih berbagi ruang dengan UGD, sedangkan ruang poliklinik yang baru sedang dibangun tahun 2013.
7. Belum ada dokter spesialis. Yang ada hanya dokter spesialis mitra.
8. Minimnya alat-alat kesehatan terutama di ruang perawatan.
9. Masih sedikitnya bed pasien dikarenakan ruangan RS selalu penuh. Bila demikian, maka pasien akan di rujuk ke RS lain yang dapat menampung pasien.

BKKBN

AKI

Dalam rangka menekan angka kematian ibu melahirkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengambil beberapa langkah antara lain menekan angka kelahiran terutama pada PUS muda dan PUS beresiko tinggi, melaksanakan pelayanan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) di setiap Posyandu, melatih Bidan di setiap desa untuk dilatih melakukan pemasangan IUD dan IMPLANT, dan menyalurkan Alat Kontrasepsi gratis di setiap desa.

Pengendalian pertumbuhan penduduk

Gerakan pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dilakukan selama ini di Kabupaten Bangka Tengah antara lain melalui pelayanan KB gratis (TKBK) di setiap posyandu, melaksanakan KIE di setiap wilayah Bangka Tengah melalui PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD melakukan penyiaran, pemutaran tentang KB di setiap wilayah Bangka Tengah, serta memberikan saran dan konsultasi kepada PUS muda parietas rendah (pustumuparen) untuk menggunakan alat kontrasepsi MKJP.

Program peningkatan kesejahteraan keluarga

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, pada tahun 2012, BPPKB membentuk kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja Sekolah dan PIK Remaja Luar Sekolah serta Forum KDRT di setiap desa se Kabupaten Bangka Tengah yang dituangkan dalam SK Kepala Desa atau Lurah.

Adapun capaian program KB dan Kependudukan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011 sebesar 102,5%, tahun 2012 mencapai 124,54% dan tahun 2013 (triwulan pertama) sebesar 21,95%. Sementara kendala yang dihadapi hingga saat ini adalah masih ada tokoh agama yang mengharamkan penggunaan alat kontrasepsi, serta kurangnya peran serta dan kurangnya kesadaran pria untuk ber KB

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Anggaran

Untuk kegiatan Tahun 2012 Realisasi anggaran kegiatan mencapai 83 %, dengan 2 Program dan 8 Kegiatan. Pemerintah daerah terus melakukan upaya dalam percepatan Realisasi penyerapan Anggaran, antara lain dengan menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan secara tepat dan efisien, melaksanakan kegiatan tepat waktu dan tepat penggunaan anggaran, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka Tengah diarahkan pada kegiatan yang bersifat pelayanan dasar, yang meliputi pelayanan pelatihan kerja, pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan kerja, dan pelayanan kepesertaan jamsostek.

Sedangkan program pembangunan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang diharapkan langsung bersentuhan dengan bidang ketenagakerjaan, baik yang dianggarkan melalui APBN (dipa maupun dekonsentrasi), maupun APBD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2013 yaitu :

1. APBN tahun 2013 melalui kegiatan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja (PPKK) pada kegiatan padat karya infrastruktur;
2. APBN melalui dana dekonsentrasi untuk kegiatan:
 - a. Penyelesaian dan pencegahan perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. Penyuluhan pembentukan sarana hubungan industrial peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, lembaga kerjasama bipartit, jamsostek, koperasi pekerja di Kabupaten Bangka Tengah; dan
 - c. Sinergisitas pendataan hubungan industrial dan jaminan sosial di Kabupaten Bangka Tengah.
3. APBD Kabupaten Bangka Tengah, yaitu :
 - a. Rapat koordinasi lembaga kerja sama tripartit;
 - b. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - c. Penyusunan dan penetapan umk/umsk;
 - d. Pengawasan pelaksanaan ketenagakerjaan di perusahaan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan;
 - f. Pendataan, pemeriksaan, pengujian, dan pengesahan objek K3;
 - g. Pengawasan pelaksanaan kepesertaan jamsostek di perusahaan;
 - h. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui kursus atau pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja;

Adapun yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut adalah kurangnya dukungan anggaran yang tersedia khususnya yang berkaitan erat dengan pelayanan dasar (standar pelayanan minimal).

Transmigrasi

Oleh karena ketiadaan lahan transmigrasi, maka alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan transmigrasi tidak Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terkait pelaksanaan dapat dianggarkan dan direncanakan bidang transmigrasi ini untuk dihapuskan.

A.3.2. Peninjauan Lapangan ke RSUD Bangka Tengah

Pada peninjauan lapangan ke RSUD Bangka Tengah, didapat data sebagai berikut:

- a. Terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien umum bila dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 14.249 kunjungan pasien.
- b. Untuk pasien yang dicover dengan jaminan kesehatan oleh pemerintah, jumlah kunjungan pasien didominasi oleh pasien jamkesda/jamkesda yaitu sebanyak 2.065 di tahun 2012.
- c. Sementara terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap pasien jamkesmas, yaitu hanya 63 kunjungan.
- d. Status RSUD Kabupaten Bangka Tengah belum dapat ditingkatkan dari type D ke type C karena masih memiliki beberapa kendala, antara lain karena belum maksimalnya fungsi RS sebagai rujukan puskesmas terkait banyaknya kasus salah diagnose.

A.3.3. Kesimpulan/temuan

Bidang Kesehatan

1. Ada peningkatan capaian program KB dan Kependudukan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2012.
2. Pemerintah kabupaten Bangka Tengah masih menghadapi kendala dalam capaian program KB karena masih ada tokoh agama yang mengharamkan penggunaan alat kontrasepsi, serta kurangnya peran serta dan kurangnya kesadaran pria untuk ber KB.
3. Perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan terhadap 16 Unit Poskesdes di Kabupaten Bangka Tengah karena merupakan bangunan lama yang sebelumnya berupa Polindes.

4. Pemerintah Kabupaten Bangka tengah telah menyediakan rumah singgah bagi pasien yang dirujuk ke Jakarta.
5. Masih banyak ditemukan balita gizi buruk di kabupaten Bangka Tengah.
6. Saat ini, pemkab Bangka Tengah sedang meningkatkan kapasitas tenaga konselor menyusui di seluruh puskesmas maupun RS.
7. Status RSUD Kabupaten Bangka Tengah belum dapat ditingkatkan dari type D ke type C karena masih memiliki beberapa kendala, antara lain karena belum maksimalnya fungsi RS sebagai rujukan puskesmas terkait banyaknya kasus salah diagnose.

Bidang Ketenagakerjaan

1. Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka Tengah masih sulit dicapai/terhambat karena kurangnya dukungan anggaran yang tersedia khususnya yang berkaitan erat dengan pelayanan dasar (standar pelayanan minimal).
2. Adanya rencana penghapusan pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini disebabkan ketiadaan lahan yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk lahan transmigran.

III. TEMUAN DAN KESIMPULAN

BIDANG KESEHATAN

1. Belum ada kegiatan sosialisasi UU BPJS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Seluruh penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam cakupan Jamkesmas. Bahkan kuota Jamkesmas melebihi jumlah penduduk miskin.
3. Menjelang pelaksanaan BPJS Kesehatan Tahun 2014, masih banyak dibutuhkan jumlah tenaga kesehatan serta ketersediaan ruang kelas III.
4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih melaksanakan Jaminan Kesehatan Daerah untuk mencakup masyarakat yang belum di cover oleh Jamkesmas.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Masih ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang dapat memberikan bantuan dana untuk calon wirausahawan, dan belum semua program CSR dapat menjawab kebutuhan wirausaha mandiri bagi masyarakat. Dari banyaknya perusahaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya 1 (satu) orang tenaga pengawas.
2. Anggaran kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mencapai 2,52% dari APBD. hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 ayat (2) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Minimnya jumlah tenaga instruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan banyaknya jumlah peserta yang akan dilatih.
4. Minimnya kesadaran perusahaan untuk melakukan wajib lapor perusahaan kepada disnaker setempat untuk dilakukan pendataan.
5. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 1 (satu) buah BLK dengan minimnya sarana dan prasarana.
6. Masih banyak perusahaan di Bangka Belitung yang tidak memasukkan pekerja dalam program jaminan kesehatan.

IV. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan jumlah anggaran kesehatan sesuai UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dan menuju pelaksanaan BPJS tahun 2014, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih lagi meningkatkan jumlah ruang kelas III serta tenaga dokter secara intensif agar dapat memenuhi kebutuhan pengobatan masyarakat.

3. Perlu dilakukan sosialisasi UU BPJS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena setelah berlakunya UU tersebut, masyarakat akan mendapatkan kemudahan untuk berobat dimanapun mereka berada.
4. Komisi IX DPR RI meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperhatikan pembenahan data penduduk *by name, by address* sebab yang mengelola data kependudukan adalah daerah.
5. Ke depan, jika cakupan Jamkesmas sudah menyeluruh, maka diharapkan pemerintah daerah tidak lagi memberlakukan program jaminan kesehatan (Jamkesda). Sebab semua akan di tanggung dan diambil alih oleh APBN sebab APBD akan diarahkan ke fasilitas pelayanan.
6. Dalam bidang ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menambah jumlah tenaga pengawas dan tidak memindahkan pengawas ke posisi lain.

V. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012 – 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 23 April sampai dengan tanggal 27 April 2013. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintah di daerah.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah, para Kepala Dinas, dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Tim Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 3 Mei 2013

Tim Kunker Komisi IX DPR RI
Ketua,



dr. RIBKA TJIPTANING

A - 342